

# IMPLEMENTASI UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN USAHA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Airin Vita Rustini Kaleb

*airinkaleb73@yahoo.com*

*(Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## Abstract

*Formulation of the problem in this study were: (1) how the implementation of Act Law No.32 of 2009 on "Protection and Enviromental Management" in business activities in the Parigi Moutong District ?, and (2) What factors are inhibiting the implementation of The Law Number 32/2009 "Protection and Enviromental Management" in the course of business in the District of Parigi Moutong ? This study method of instruction in quantitative descriptive analysis in the form of frequency table to solve research problems, using the theory refers to C. Edward III (1980:80) states that one of the approaches to the study of implementation should begin with the question of what is the prerequisite for the implementation of the policy and what is the major limiting factor for the success of policy implementation. Edward tries to answer two important questions to discuss four crucial variable in policy implementation, namely: 1) communication, 2) resources, 3) dispositions, and 4) bureaucratic structure. The results showed that the implementation of Law No.32 Year 2009 concerning the protection and management of environment on business activity in the District Parigi Moutong has been implemented with good views of the factor of communication, resources, disposition, and organizational structure.*

**Keywords:** *Implementation, protection, management, policy, sustainable development*

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya (Santosa, 2004: 2):

“Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan

berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat”.

Sifat ganda dari fungsi pembangunan adalah pada satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*progresif*), sedangkan pada sisi lainnya dapat merosotkan kualitas hidup manusia (*regresif*). Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan pembangunan dengan penetapan desain pembangunan, termasuk perhitungan terhadap risiko dan cara mengatasi risiko sebagai dampak yang ditimbulkan dari pembangunan. Sebab, salah satu kegagalan pengaktualisasian pembangunan berkelanjutan, menurut Santosa (2004: 3) adalah ketidakmampuan para penentu kebijakan untuk mengintegrasikan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekologi, ekonomi, sosial dan budaya ke dalam proses pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan pembangunan.

Agar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang melibatkan peran serta dunia usaha tidak memberikan ekse (dampak) negatif terhadap kelestarian lingkungan, maka dibutuhkan *political will* (kemauan yang kuat) di antara para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha sehingga keberadaan dunia usaha sebagai salah satu pilar penunjang pembangunan dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana tempatnya beroperasi, sehingga pembangunan yang didorong oleh keberadaan dunia usaha mampu menciptakan sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai bukti adanya penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh dunia usaha, termasuk dengan regulasinya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2).

Perencanaan yang dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut adalah upaya pemerintah untuk menganalisis studi kelayakan dari kegiatan usaha tertentu yang akan didirikan. Artinya, ada upaya dari pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan penganalisaan terhadap dampak lingkungan hidup yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari pendirian suatu kegiatan usaha ekonomi tertentu sebelum kegiatan usaha ekonomi tersebut didirikan. Tindakan perencanaan ini merupakan upaya preventif pemerintah dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kegiatan usaha yang didirikan oleh para pelaku ekonomi nantinya benar-benar berorientasi pada kemajuan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup atau dengan kata lain kegiatan usaha yang ada ramah pada lingkungan hidup.

Pemanfaatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah kegiatan usaha ekonomi tertentu yang didirikan benar-benar mendukung percepatan pembangunan dan memberikan azas manfaat terhadap lingkungan hidup yang ada. Artinya, kegiatan usaha ekonomi tertentu yang ada dalam aktivitasnya tidak menimbulkan ekse pencemaran terhadap lingkungan hidup atau dengan kata lain di dalam pengelolaan kegiatan usaha ekonomi tersebut ada upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar lokasi pendirian kegiatan usaha ekonomi tertentu sebagai bagian dari azas pemanfaatan kegiatan usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengendalian yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup” adalah upaya pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pelaku-pelaku usaha yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan usaha ekonomi tertentu yang didirikan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud meliputi tindakan pengendalian pencemaran air, udara dan laut serta tindakan pengendalian terhadap kerusakan ekosistem.

Pemeliharaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah kegiatan usaha ekonomi tertentu yang didirikan selain mendukung percepatan pembangunan, disisi lain benar-benar memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup yang ada atau dengan kata lain kegiatan usaha ekonomi tertentu yang dikelola harus ramah terhadap lingkungan hidup yang ada dengan mengedepankan unsur kearifan lokal di dalam pengelolaan kegiatan usaha ekonomi tertentu tersebut.

Penegakan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah upaya pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pelaku-pelaku kegiatan usaha ekonomi tertentu yang di dalam menjalankan aktivitas usahanya terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi batas toleransi analisa dampak lingkungan yang berlaku. Tindakan penegakan hukum ini bisa berujung pada penuntutan secara pidana bila kegiatan usaha ekonomi tertentu yang dikelola pelaku-pelaku usaha sudah terindikasi memberikan eksekusi negatif atau membahayakan keberadaan lingkungan hidup atau dengan kata lain

didalam aktivitas kegiatan usaha ekonomi tertentu tersebut sudah tidak ada unsur untuk melindungi lingkungan hidup yang ada di sekitar wilayah kegiatan usaha ekonomi tertentu tersebut didirikan.

Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ketentuan di atas merupakan inti isi dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang turut pula memberikan pengaruh pada kegiatan usaha ekonomi tertentu yang ada di Kabupaten Parigi Moutong yang ditetapkan sebagai lokasi dari penelitian ini. Kegiatan usaha ekonomi tertentu yang ada di Kabupaten Parigi Moutong di satu sisi memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di wlayah Kabupaten Parigi Moutong sehingga tercapai kesinambungan pembangunan atau pembangunan berkelanjutan dan di sisi lain kegiatan usaha ekonomi tertentu tersebut dalam aktivitasnya juga memperhatikan keberadaan lingkungan hidup yang ada sehingga ada keseimbangan peran dari kegiatan ekonomi tertentu yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

Fenomena yang ada di Kabupaten Parigi Moutong saat ini berkaitan dengan pengimplementasian UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup” adalah bahwa keberadaan kegiatan usaha dari 74 orang pemilik gilingan padi yang tersebar pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Parigi Moutong bila keberadaan dari kegiatan usaha penggilingan padi tersebut aktivitasnya tidak dipantau oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini disebabkan karena lokasi pendirian kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong awalnya masih tergolong berada di pinggiran kota atau cukup jauh dari pemukiman penduduk, namun seiring dengan kemajuan pembangunan di wilayah Parigi setelah daerah tersebut dimekarkan menjadi Kabupaten Parigi Moutong, maka di sekitar lokasi kegiatan usaha penggilingan padi tersebut telah banyak berdiri pemukiman-pemukiman penduduk sehingga keberadaan kegiatan usaha penggilingan padi ini potensial dapat menimbulkan eksekusi negatif terhadap keberadaan ekosistem lingkungan hidup dalam hal pencemaran udara dan kebisingan bila aktivitasnya dipantau oleh pemerintah. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong terhadap aktivitas kegiatan usaha penggilingan padi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong berkaitan dengan dampak yang timbulkan dari aktivitas usaha penggilingan padi tersebut terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dilihat dari segi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada

kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong ?

## METODE

Tipe penelitian ini adalah metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi yang ada dengan menggunakan kuesioner penelitian dalam bentuk tertutup (*multiple burjoice*) sebagai pengumpul data utama dalam menjawab masalah yang dirumuskan pada objek penelitian ini yakni pengaruh implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong.

### Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, maka digunakan pendekatan tabel frekuensi, yang digunakan untuk mendeskripsikan tanggapan responden terhadap implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

N = Jumlah responden

F = Frekuensi

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel akan dijabarkan menjadi indikator yang dapat

diukur. Akhirnya indikator yang akan diukur dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden, maka setiap item dari jawaban yang diberikan akan ditentukan berdasarkan interval 1,2,3,4,5 dengan asumsi:

- a. Sangat Baik (SB) = Dinilai dengan bobot 5
- b. Baik (B) = Dinilai dengan bobot 4
- c. Kurang Baik (KB) = Dinilai dengan bobot 3
- d. Tidak Baik (TB) = Dinilai dengan bobot 2
- e. Sangat Tidak Baik (STB) = Dinilai dengan bobot 1

Berdasarkan jumlah sampel penelitian sebanyak 74 responden pemilik kegiatan usaha penggilingan padi yang dipantau oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong, maka dapat diketahui skor minimum penilaian responden akan implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong dengan uraian sebagai berikut: (1 X 74) adalah 74 dan skor maksimum penilaian responden (5 X 74) adalah 370, maka intervalnya =  $370 - 74 / 5$  adalah 59,2, sehingga dapat diketahui dan dianalisis implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sangat Baik (SB), bila memiliki skor pada skala
- b. Baik (B), bila memiliki skor pada skala
- c. Kurang Baik (KB), bila memiliki skor pada skala
- d. Tidak Baik (TB), bila memiliki skor pada skala
- e. Sangat Tidak Baik (STB), bila memiliki skor pada skala:  $74 - 133,2$

Selanjutnya untuk mendukung pendeskripsian tanggapan responden terhadap implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan Tabel Frekuensi di atas, maka penulis menggunakan metode analisis kuantitatif dalam bentuk pemaparan melalui hasil perhitungan angka-angka statistik dengan alat statistik analisis Chi-Kuadrat (Supranto, 2002: 291) dengan formulasi sebagai berikut:

$$Fe = \frac{Nj \times Ni}{N}$$

$$Chi\ Kuadrat (X^2) = \frac{Fo - Fh}{Fh}$$

Dimana:

- Fo = Frekuensi pengamatan
- Fh = Frekuensi harapan
- Nj = Jumlah baris ke-j
- Ni = Jumlah kolom ke-i
- N = Jumlah keseluruhan sampel

Dari hasil perhitungan Chi Kuadrat tersebut, akan ditemukan dua kemungkinan jawaban sebagai bahan analisis yaitu :

1. Jika  $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$ , maka artinya tidak ada perbedaan yang nyata persepsi pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutang terhadap implementasi UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha penggilingan padi, dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.
2. Jika  $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ , maka artinya ada perbedaan yang nyata persepsi pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutang terhadap implementasi UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha penggilingan padi, dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong**

Implementasi kebijakan merupakan satu dari beberapa bagian yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan, maka akan menjadi impian belaka. Dalam studi implementasi kebijakan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain seperti yang dikemukakan oleh Edward III, merumuskan empat faktor yang merupakan syarat-syarat penting guna berhasilnya implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: *Communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.*

Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, maka akan dianalisis berdasarkan 4 (empat) variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

**Komunikasi**

Komunikasi memegang peranan penting karena *implementor* keputusan harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Berhubungan dengan penelitian ini, distribusi frekuensi tanggapan responden (pemilik usaha penggilingan padi) mengenai kejelasan kegiatan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang pernah disampaikan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kejelasan Sosialisasi dalam Komunikasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	5	25	6,8
2.	Baik	251,9-311,1	4	33	132	44,6
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	17	51	23,0
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	19	38	25,7
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	246	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Hasil tanggapan responden (pemilik usaha penggilingan padi) di atas menunjukkan bahwa jumlah skor yang didapatkan sebanyak 246, artinya secara kontinu ditetapkan jawaban tersebut berada dalam posisi “Kurang Baik”. Dengan demikian komunikasi implementasi UU No. 32 Tahun 2009 yang pernah dilaksanakan BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk

kejelasan kegiatan sosialisasi dinilai masih kurang dapat dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong yang kegiatan usahanya mendapatkan pemantauan. Namun demikian, tetap ada perbedaan yang dirasakan yang diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Kejelasan Sosialisasi Dalam Komunikasi  
Test Statistics

	Kejelasan sosialisasi
Chi-Square	21.351 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 2 di atas, menunjukkan hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $21.351 < X^2$ -tabel ( $df = 3$ ) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 <$  tingkat kesalahan ( $\alpha = 0.05$ ). Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa kejelasan sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup” yang disampaikan BPLH memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Berkaitan dengan hal konsistensi kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari komunikasi dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2009 yang pernah disampaikan BPLH Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Konsistensi Sosialisasi dalam Komunikasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	4	20	5,4
2.	Baik	251,9-311,1	4	43	172	58,1
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	12	36	16,2
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	12	24	16,2
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	3	3	4,1
Jumlah Total				74	255	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Dari hasil olahan data di atas menunjukkan bahwa jumlah skor yang didapatkan sebanyak 255, artinya secara kontinu ditetapkan jawaban tersebut berada dalam posisi “Baik”. Hal ini menjelaskan bahwa konsistensi kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPLH Kabupaten Parigi Moutong

dinilai oleh pemilik usaha penggilingan padi sudah maksimal menjangkau semua pelaku kegiatan usaha yang kegiatannya mendapatkan pemantauan. Hal tersebut di atas terbukti dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Konsistensi Sosialisasi Dalam Komunikasi  
Test Statistics

	Konsistensi sosialisasi
Chi-Square	72.081 <sup>a</sup>
df	4
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $72.081 < X^2$ -tabel ( $df = 4$ ) sebesar 12.695 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 < \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0.05)$ . Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang konsistensi sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 yang disampaikan BPLH memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat (Pemilik Usaha Gilingan Padi) di Desa Sumbersari Kabupaten Parigi Moutong dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

“Komunikasi yang pernah dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong telah disosialisasikan dengan cukup jelas kepada para pelaku usaha dan pegawai yang mensosialisasikan undang-undang tersebut memiliki pemahaman yang sama”.

**Sumber Daya**

Sumber daya implementator mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Walaupun suatu kebijakan sudah baik akan tetapi kalau tidak ditunjang oleh sumber daya pelaksana kebijakan yang berkualitas, maka mustahil kebijakan tersebut akan berhasil maksimal.

Berdasarkan hal di atas untuk mengetahui dukungan sumber daya manusia di BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009, dapat dilihat dari hasil distribusi tanggapan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	10	50	13,5
2.	Baik	251,9-311,1	4	40	160	54,1
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	9	27	12,2
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	12	24	16,2
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	3	3	4,1
Jumlah Total				74	264	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Dari hasil olahan data di atas diperoleh skor jawaban berjumlah 264, berada pada garis interval “Baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui dukungan sumber daya manusia yang memadai kinerja pegawai dapat dimaksimalkan dalam mengimplementasikan UU No. 32 Tahun

2009 sehingga keinginan implementasi dapat berjalan sesuai dengan standar yang ada dapat diwujudkan. Hal tersebut di atas terbukti dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Dukungan Sumber Daya Manusia

Test Statistics	
	Konsistensi sosialisasi
Chi-Square	56.676 <sup>a</sup>
df	4
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $56.676 < X^2$ -tabel (df = 4) sebesar 12.695 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 <$  tingkat kesalahan ( $\alpha = 0.05$ ). Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa dukungan sumberdaya manusia yang memadai pada BPLH dalam

mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Selanjutnya dukungan kompetensi atau kemampuan/kualitas sumber daya manusia di BPLH Kabupaten Parigi Moutong, terlihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Kompetensi atau Kemampuan/Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	7	35	9,5
2.	Baik	251,9-311,1	4	38	152	51,4
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	6	18	8,1
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	23	46	31,1
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	251	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Dari hasil olahan data primer di atas diperoleh skor sebesar 251, artinya secara kontinu berada pada posisi “Kurang Baik” sehingga pemilik usaha gilingan padi meyakini bahwa kompetensi atau kemampuan/kualitas sumber daya manusia aparatur pegawai pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong kurang dapat menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) pegawai dalam meningkatkan kesuksesan pengimplementasian UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong. Namun demikian, tetap ada perbedaan yang dirasakan yang diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Dukungan Kompetensi atau Kemampuan/Kualitas Sumber Daya Manusia

Test Statistics	
	Dukungan kompetensi sumberdaya manusia
Chi-Square	37.243 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $37.243 > X^2$ -tabel ( $df = 3$ ) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 < \text{tingkat kesalahan } (\alpha = 0.05)$ . Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa dukungan kompetensi atau kemampuan/kualitas sumber daya manusia aparatur pegawai pada BPLH dalam mensosialisasikan UU No. 32 Tahun

2009 memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Berikut kita dapat melihat tanggapan responden mengenai kualitas fasilitas yang ada pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pensosialisasian UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan hasil distribusi tanggapan responden seperti terlihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Fasilitas yang ada pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	6	30	8,1
2.	Baik	251,9-311,1	4	42	168	56,8
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	13	36	17,6
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	13	26	17,6
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	290	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Berdasarkan hasil olahan data sub variabel di atas menunjukkan bahwa skor yang didapatkan sebanyak 290, artinya secara kontinu berada dalam posisi “Baik”. Pemilik usaha gilingan padi meyakini bahwa fasilitas yang ada pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong sepenuhnya memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan dukungan pada keberhasilan aparatur pegawai dalam

mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal tersebut di atas terbukti dari adanya perbedaan yang dirasakan yang dapat diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Kualitas Fasilitas yang ada pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong

Test Statistics	
	Kualitas fasilitas yang ada
Chi-Square	41.568 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $41.568 > X^2$ -tabel ( $df = 3$ ) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 < \text{tingkat kesalahan } (\alpha = 0.05)$ . Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa kualitas fasilitas yang ada pada BPLH dalam mendukung keberhasilan aparatur pegawai mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal di atas didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi (Pemilik Gilingan Padi) di Desa Dolago Kabupaten Parigi Moutong dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

“Saat saya mengikuti sosialisasi Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, saya melihat kompetensi atau

kemampuan aparatur pegawai serta kualitas fasilitas (sarana dan prasarana) yang ada pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong telah memadai untuk mendukung sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” kepada para pelaku usaha yang kegiatan usahanya mendapatkan pemantauan”.

**Disposisi**

Variabel ini cukup diperhitungkan mengingat bahwa seorang aparatur pemerintah harus memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pimpinan instansi. Untuk mengetahui pemahaman pegawai yang ada pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, maka dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Pegawai dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Sosialisasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	5	25	6,8
2.	Baik	251,9-311,1	4	28	112	37,8
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	5	15	6,8
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	29	58	39,2
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	7	7	9,5
Jumlah Total				74	217	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Hasil olahan data primer di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mencapai skor 217. Hal ini memberikan arti tanggapan responden secara kontinu berada pada garis penilaian “Kurang Baik” sehingga pemilik usaha gilingan padi meyakini pegawai yang ada pada BPLH Kabupaten

Parigi Moutong kurang memiliki pemahaman yang baik dalam mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009. Namun demikian, tetap ada perbedaan yang dirasakan yang dapat diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Pemahaman Pegawai dalam melaksanakan Tugas-Tugas Sosialisasi

Test Statistics	
	Pemahaman pegawai dalam melaksanakan tugas
Chi-Square	42.486 <sup>a</sup>
df	4
Asymp. Sig.	.000

- a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.
- b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $42.486 > X^2$ -tabel ( $df = 4$ ) sebesar 12.695 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 < \text{tingkat kesalahan } (\alpha = 0.05)$ . Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi memandang bahwa pemahaman pegawai yang ada pada BPLH dalam mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada kegiatan

usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Hasil tanggapan responden tentang pemberian motivasi pimpinan kepada pegawai pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pelaksanaan pensosialisasian UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Motivasi Kepada Pegawai dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Sosialisasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	5	25	6,8
2.	Baik	251,9-311,1	4	42	168	56,8
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	25	75	33,8
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	2	4	2,7
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	272	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Hasil olahan data primer di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mencapai skor 272. Hal ini memberikan arti secara kontinu berada pada garis penilaian “Baik” sehingga pemberian motivasi pimpinan kepada pegawai dinilai telah maksimal memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi (Tupoksi) pegawai didalam mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 kepada para pelaku kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal tersebut di atas terbukti dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Pemberian Motivasi Kepada Pegawai dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Sosialisasi

Test Statistics	
	Pemberian motivasi kepada pegawai
Chi-Square	56.703 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $56.703 > X^2$ -tabel ( $df = 3$ ) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 < \text{tingkat kesalahan } (\alpha = 0.05)$ . Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi memandang bahwa pemberian motivasi kepada pegawai pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada

kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Berikut ini tanggapan responden berhubungan dengan keaktifan pegawai pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pensosialisasian UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, seperti terlihat pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Pegawai Mendukung Pelaksanaan Sosialisasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	7	35	9,5
2.	Baik	251,9-311,1	4	38	152	51,4
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	21	63	28,4
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	8	16	10,8
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	266	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Tabel 15 di atas memberikan arti ada dukungan disposisi atau watak yang kuat dari pegawai untuk bertekad mampu melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai wujud dukungan mereka pada keberhasilan implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal tersebut di atas terbukti dari adanya perbedaan yang dirasakan yang dapat diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Keaktifan Pegawai Mendukung Pelaksanaan Sosialisasi

Test Statistics	
	Keaktifan pegawai
Chi-Square	34.000 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 16 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar 30.000 >  $X^2$ -tabel (df = 3) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah 0.000 < tingkat kesalahan ( $\alpha = 0.05$ ). Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa keaktifan pegawai pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong untuk memberikan dukungan pada pensosialisasian UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal di atas didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yunus (Pemilik Gilingan Padi) di Desa Torue Kabupaten Parigi Moutong yang berpendapat bahwa:

“Saya melihat bahwa sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 kepada para pelaku usaha yang kegiatan usahanya dipantau oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) pelaksanaannya telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, saya melihat pula bahwa aparatur pegawai pada Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) memiliki komitmen yang sama untuk mendukung sosialisasi Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

**Struktur Birokrasi**

Dalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong, aparatur pegawai mempunyai tugas atau kewenangan yang berbeda-beda, namun dalam implementasi belum menunjukkan keberhasilan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugas masih sebatas perintah atasan bukan karena tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam struktur birokrasi.

Berikut ini akan diuraikan tanggapan responden terhadap koordinasi pegawai pada BPLH Kabupaten Parigi Moutong dengan para pelaku usaha ketika akan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, seperti terlihat pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Koordinasi Pegawai dengan Para Pelaku Usaha ketika Melakukan Sosialisasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	5	25	6,8
2.	Baik	251,9-311,1	4	36	144	48,6
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	27	81	36,5
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	6	12	8,1
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	262	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Dari hasil olahan data di atas diperoleh skor 262 yang secara kontinum terletak pada garis penilaian “Baik”. Artinya bahwa koordinasi diantara pegawai pada BPLH dengan para pelaku usaha telah terjalin dengan baik ketika akan mensosialisasikan

UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal tersebut di atas terbukti dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Koordinasi Pegawai dengan Para Pelaku Usaha Ketika Melakukan Sosialisasi

Test Statistics	
	Koordinasi pegawai dengan para pelaku usaha
Chi-Square	38.757 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 18 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $38.757 > X^2$ -tabel ( $df = 3$ ) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 < \text{tingkat kesalahan } (\alpha = 0.05)$ . Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa koordinasi di antara pegawai pada BPLH dengan para pelaku usaha ketika akan mensosialisasikan

UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Keberhasilan implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh penguasaan prosedur dan program kerja pegawai seperti terlihat pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Penguasaan Prosedur dan Program Kerja Pegawai ketika Melakukan Sosialisasi

	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	8	40	10,8
2.	Baik	251,9-311,1	4	32	128	43,2
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	25	75	33,8
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	9	18	12,2
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	0	0	0,0
Jumlah Total				74	261	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Dari hasil olahan data primer diperoleh skor 261. Ini berarti secara kontinu berada pada posisi penilaian “Baik” sehingga memberikan makna pegawai pada BPLH mampu menguasai prosedur dan program kerja dengan baik ketika mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang tugasnya masing-masing. Hal tersebut di atas terbukti dari adanya perbedaan yang dirasakan yang dapat diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Koordinasi Pegawai dengan Para Pelaku Usaha Ketika Melakukan Sosialisasi

Test Statistics	
	Koordinasi pegawai dengan para pelaku usaha
Chi-Square	22.973 <sup>a</sup>
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.  
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 20 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar 22.973 >  $X^2$ -tabel (df = 3) sebesar 9.488 atau nilai *Asymp. Sig* adalah 0.000 < tingkat kesalahan ( $\alpha = 0.05$ ). Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa kemampuan pegawai menguasai prosedur dan program kerja dengan baik ketika mensosialisasikan UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak

pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden terhadap penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, dapat dilihat dalam Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Penerapan *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam Kegiatan Sosialisasi

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase
1.	Sangat Baik	311,2-370,0	5	5	25	6,8
2.	Baik	251,9-311,1	4	35	140	47,3
3.	Kurang Baik	192,6-251,8	3	24	72	32,4
4.	Tidak Baik	133,3-192,5	2	9	18	12,2
5.	Sangat Tidak Baik	74-133,2	1	1	1	1,4
Jumlah Total				74	256	100,0

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2012.

Dari hasil olahan data primer diperoleh skor tanggapan 256. Ini berarti secara kontinu tanggapan responden berada pada posisi penilaian “Baik”, artinya dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2009 pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, aparatur pegawai pada BPLH selaku implementator telah mengimplementasikan undang-undang

pelestarian lingkungan hidup tersebut sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang ada.

Hal tersebut di atas terbukti dari adanya perbedaan yang dapat diketahui dari hasil analisis Tes Chi Kuadrat, dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22. Hasil Analisis Tes Chi Kuadrat Penerapan *Standard Operasional Prosedur (SOP)* Dalam Kegiatan Sosialisasi

Test Statistics	
	Koordinasi pegawai dengan para pelaku usaha
Chi-Square	54.919 <sup>a</sup>
df	4
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18,5.

b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 14,8.

Hasil analisis Tes Chi Kuadrat pada Tabel 22 di atas, menunjukkan bahwa hasil  $X^2$ -hitung sebesar  $54.919 > X^2$ -tabel ( $df = 4$ ) sebesar 12.695 atau nilai *Asymp. Sig* adalah  $0.000 <$  tingkat kesalahan ( $\alpha = 0.05$ ). Hal ini memberikan arti bahwa pemilik usaha penggilingan padi memandang bahwa penerapan *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam pensosialisasian UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dampak pada kegiatan usaha penggilingan padi di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Wayan (Pemilik Usaha Penggilingan Padi) di Desa Tolai Kabupaten Parigi Moutong, di mana beliau mengatakan:

“Ketika mengikuti sosialisasi Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” kepada para pelaku kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, saya melihat adanya pembagian tugas dan koordinasi yang jelas, adanya bentuk perhatian dan pembinaan yang terpadu dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) kepada para pelaku usaha yang kegiatan usahanya mendapatkan pemantauan. Selain itu saya juga melihat pensosialisasian Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan StandarD Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan”.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

1. Implementasi UU No.32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai telah terlaksana dengan baik.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi UU No.32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya adalah masih minimnya kegiatan sosialisasi dan pendidikan yang memadai serta kurangnya pelatihan-pelatihan kepada pegawai.

### Rekomendasi

1. Agar Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Kepala Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong memberikan pendidikan yang memadai, memberikan kesejahteraan yang sesuai dan memberikan perhatian kepada seluruh stafnya sehingga pegawai dapat meningkatkan kinerja didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mensosialisasikan UU No.32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara lebih efisien dan efektif kepada para pelaku usaha yang kegiatan usahanya mendapatkan pemantauan

2. Agar Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong meningkatkan motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya dalam mensosialisasikan UU No.32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, senantiasa berpedoman pada ketentuan

yang telah ditetapkan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku.

3. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan riset penelitian serupa dengan penelitian ini sehingga tingkat kebenaran hasil pengkajian terhadap implementasi UU No.32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada kegiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat lebih komprehensif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya menghanturkan terima kasih kepada Tim Pembimbing Bapak Prof. Anhulaila M. Palampanga, S.E., M.S dan Dr. Ir. Muh. Nursangadji, DEA yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, arahan dan saran yang tidak ternilai harganya untuk kesempurnaan artikel ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press
- Santosa, Pandji. 2004. *Administrasi Publik*. Bandung: Rafika aditama.
- Supranto, J., 2002. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jilid Pertama, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.